



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR UMUM, KEUANGAN DAN SDM**
3. NHK : **638664**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **193.960.000**

1. MOBIL, RUSH 1,5 S M/T TOYOTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.100.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.160.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.200.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **84.100.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **248.922.589**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **1.276.982.589**

**III. HUTANG** Rp. **160.162.454**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.116.820.135**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RANI FITRIZIA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 407530

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	42.000.000
1. MOBIL, AVANZA TOYOTA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
2. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	3.400.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	17.202.844
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	Rp.	962.602.844

**III. HUTANG** Rp. 381.051.417

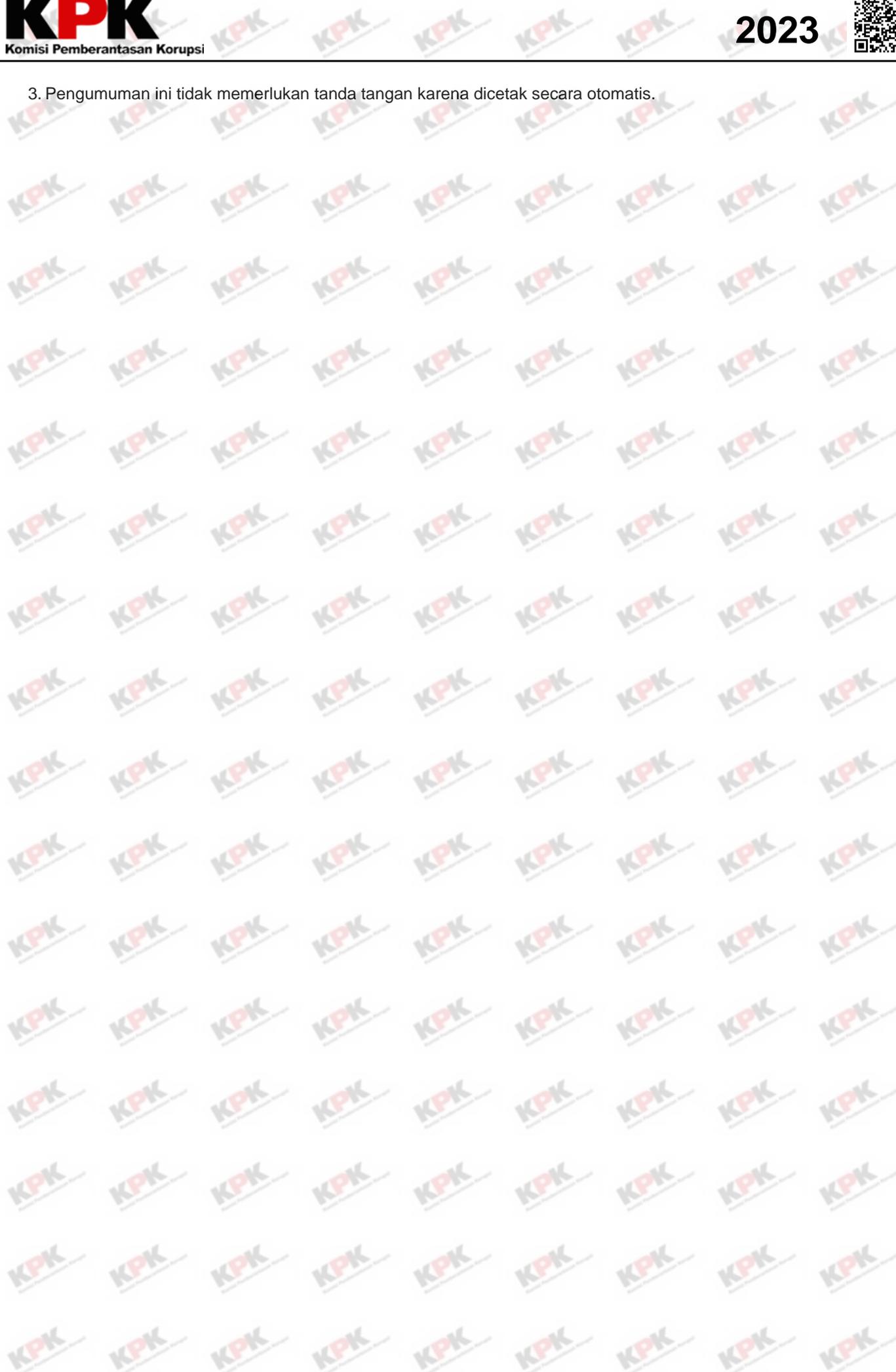
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 581.551.427

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HELENA DESFAROZA HAMZAH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 275129

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 143.800.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2020, WARISAN Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 72.140.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.667.328

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 643.607.328

**III. HUTANG** Rp. 65.625.000

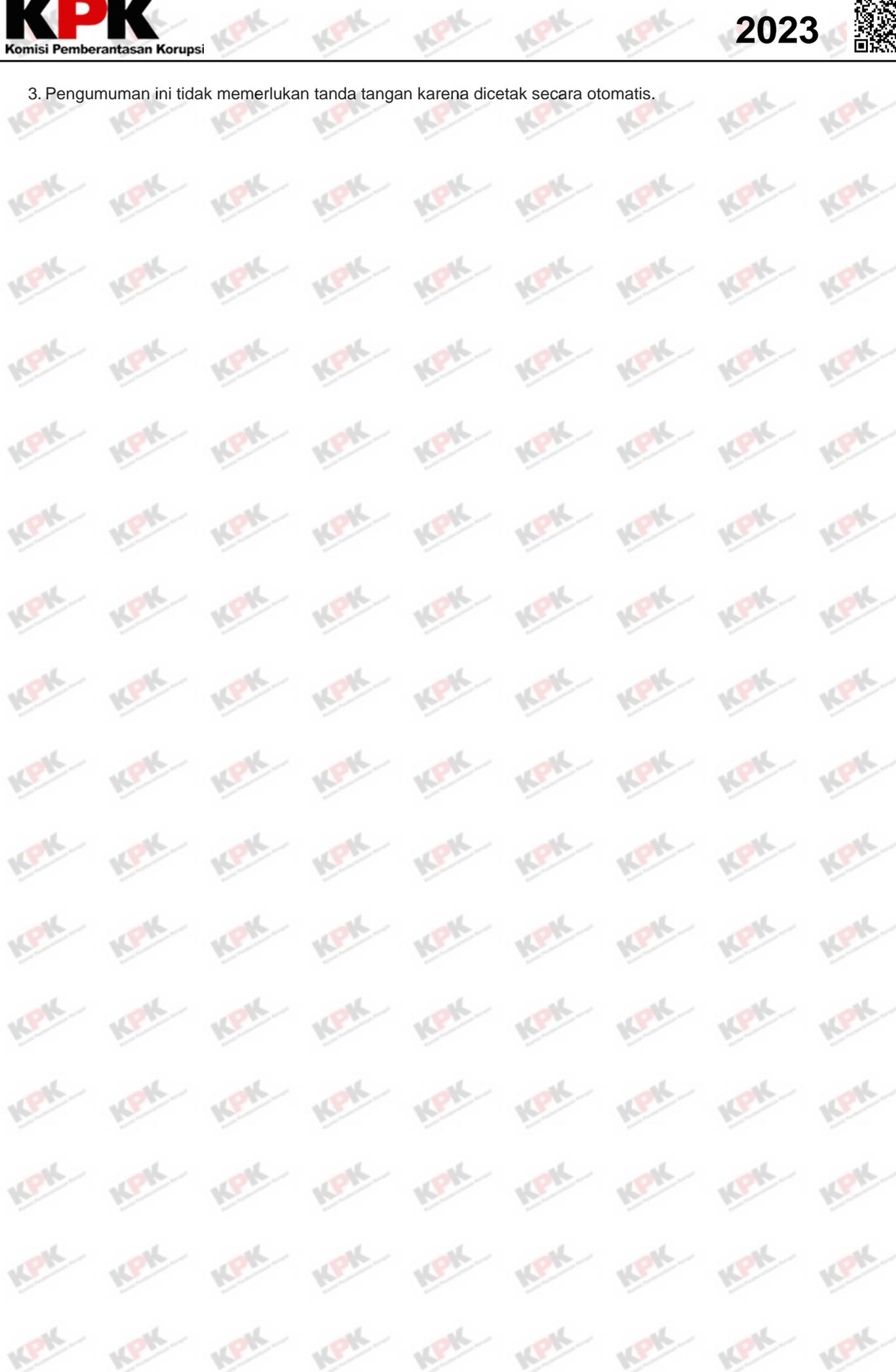
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 577.982.328

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YOSI AFRIANI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 904125

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>620.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 508.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>139.000.000</b>
1. MOBIL, AVANZA TIPE G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000		
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000		
4. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>8.800.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>44.186.508</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>811.986.508</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>533.761.715</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>278.224.793</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.